KEPEMIMPINAN I MALLINGKANG DAENG MANNYONRI PADA MASA AWAL ISLAM DI KERAJAAN TALLO: KAJIAN LONTARAK PATTURIOLOANG RI TUTALLOKA (Sejarah Tallo)

Erlangga Setiawan. L[1], Yulsiani[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: erlanggasetiawan265@gmail.com, yulsi0804@gmail.com

Abstract

This study discusses the leadership of I Mallingkang Daeng Mannyonri, also known as Karaeng Matoaya, as the 6th King of the Tallo Kingdom during the early period of Islamization in South Sulawesi. The focus of this research is directed at the integration of the local ethical values of the Makassar society with Islamic teachings, as well as its influence on government policies, leadership patterns, and social changes within the Tallo Kingdom community. This study employs the historical method with sociological, religious, and Islamic political approaches. The primary source for this research is the Lontarak Patturioloang ri TuTalloka manuscript, supported by various historical literatures related to the Islamization and governance of Gowa-Tallo. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography.

The results indicate that Karaeng Matoaya's leadership successfully integrated local values such as siri' (honor/shame), lambusuk (honesty), and pacce' (empathy/solidarity) with Islamic principles such as amanah (trustworthiness), justice, deliberation (musyawarah), and responsibility. The Islamization in the Tallo Kingdom took place through a process of cultural accommodation rather than the eradication of customs, ensuring that the Pangadakkang (customary system) was maintained and harmonized with Islamic Sharia. This integration is evident in the formation of the Parewa Sarak institution as a religious body that operated alongside the kingdom's traditional customary institutions. Furthermore, Karaeng Matoaya's leadership demonstrates a transformation of power legitimacy, shifting from a lineage- and custom-based foundation toward a concept of power as a moral and religious mandate. In the political and social spheres, his government policies reflected a humanistic, just leadership oriented toward public welfare, including in diplomatic relations and the spread of Islam in South Sulawesi.

This study concludes that the leadership of I Mallingkang Daeng Mannyonri represents a fusion between local Makassarese political traditions and Islamic political ethics, which gave rise to an adaptive and accommodative model of governance toward local culture. This process resulted in a harmonious social-religious transformation and strengthened the position of the Gowa-Tallo Kingdom as a political, commercial, and Islamic dissemination hub in the eastern archipelago during the early 17th century.

Keywords: *Karaeng Matoaya, Tallo Kingdom, Islamization, Pangadakkang, Islamic Leadership, Lontarak Patturioloang ri TuTalloka.*

Abstrak

Penelitian ini membahas kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri atau Kareng Matoaya sebagai raja ke-VI Kerajaan Tallo pada masa awal islamisasi di sulawesi selatan. Fokus penelitian di arahkan pada integrasi nilai etika lokal masyarakat makassar dengan ajaran Islam serta pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintahan, pola kepemimpinan, dan perubahan sosial masyarakat Kerajaan Tallo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sosiaologis, pendekatan agama, dan pendekatan politik Islam. Sumber utama penelitian berasal dari Naskah Lontarak Patturioloang Ri Tutalloka yang di dukung oleh berbagai literatur sejarah terkait Islamisasi dan pemerintahan Gowa Tallo. Tahapan penelitian meliputi Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Karaeng Matoaya berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti *siri', lambusuk,* dan *pacce'* dengan prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Islamisasi di Kerajaan Tallo berlangsung melalui proses okomodasi budaya, bukan penghapusan adat, sehingga sistem *Pangadakkang* tetap di pertahankan dan dipadukan dengan syariat Islam. Integrasi tersebut tampak dalam pembentukan lembaga Parewa Sarak sebagai institusi keagamaan yang berjalan berdampingan dengan lembaga adat kerajaan. Selain itu, kepemimpinan Karaeng Matoaya memperlihatkan transformasi legitimasi kekuasaan dari yang semula berbasis keturunan dan adat menuju konsep kekuasaan sebagai amanah moral dan religius. Dalam bidang politik dan sosial, kebijakan pemerintahannya mencerminkan kepemimpinan yang humanis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hubungan diplomasi dan oenyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri merupakan bentuk perpaduan antara tradisi politik lokal Makassar dengan etika politik Islam yang melahirkan model pemerintahan adaktif dan akomodatif terhadap budaya lokal. Proses tersebut menghasilkan transformasi sosial keagamaan yang berlangsung secara harmonis serta memperkuat posisi Kerajaan Gowa Tallo sebagai pusat politik, perdagangan, dan penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara pada awal abad XVII.

Kata kunci: Karaeng Matoaya, Kerajaan Tallo, Islamisasi, Pangadakkang, Kepemimpinan Islam, Lontarak Patturioloang Ri Tutalloka.

Pendahuluan

Islamisasi di Nusantara merupakan salah satu proses historis paling penting dalam perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut M. C Ricklefs, Penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya membawa perubahan keagamaan, tetapi juga memengaruhi struktur kekuasaan, sistem sosial, dan pola kehidupan masyarakat.[1] Di Indonesia penyebaran Islam dibagi menjadi 2 pola utama, yaitu *Top-down* dan *Bottom-up*. Pola *Top-down* (atas-bawah) adalah keadaan dimana Raja/Bangsawan yang lebih dahulu menerima Islam lalu kemudian diikuti rakyatnya. Oleh karena itu, peran bangsawan dan kerajaan menjadi salah satu hal penting untuk dibahas. Sulawesi Selatan terkhusus Kerajaan Tallo penyebaran Islamnya itu terjadi secara *Top-down*, yaitu pengislaman penguasa terlebih dahulu sebelum melalui pola top-

[1]Nasihin, St Junaeda, and Fatjri Nur Tajuddin, 'Islamization in South Sulawesi and Its Institutionalisation As The State Religion (1605–1611)', *Journal of Social and Islamic Culture*, 32.2 (2024), pp. 45–66, doi:10.19105/karsa.v32i2.13834.

down, yaitu pengIslaman penguasa terlebih dahulu sebelum diikuti masyarakatnya. Dalam konteks tersebut, terutama Kerajaan Gowa-Tallo yang berkembang menjadi kekuatan maritim terbesar di kawasan timur Nusantara pada XVI-XVII.

Kerajaan Tallo memiliki posisi strategis dalam sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Bersama Gowa, kerajaan ini membentuk persekutuan politik. Selain berkembang sebagai pusat penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara, Informasi mengenai perkembangan politik, pemerintahan serta kehidupan sosial Kerajaan Tallo banyak tertulis dalam naskah Lontara , salah satunya adalah *Lontarak Patturioloang Ri TuTalloka*.Lontarak ini memuat silsilah raja-raja Tallo, kebijakan kerajaan, sistem pemerintah, arsitektur serta dinamika sosial-politik di Kerajaan Tallo.

I Mallingkang Daeng Mannyonri atau Karaeng Matoaya merupakan Raja ke-VI Kerajaan Tallo, salah satu tokoh penting dalam Lontarak tersebut, dan dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam proses perubahan sistem kepemimpinan, terutama masa penerimaan dan perkembangan Islam. Dalam sejarah Sulawesi Selatan, Karaeng Matoaya dikenal sebagai tokoh sentral dalam proses Islamisasi dan konsolidasi politik Kerajaan Makassar pada awal abad XVII. Kepemimpinannya tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam, tetapi juga dalam penguatan sistem pemerintahan, perdagangan, dan militer kerajaan. Setelah memeluk Islam pada tahun 1605, Karaeng Matoaya mulai mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan adat yang sebelumnya berlandaskan *Pengadakkang* sebagai sistem norma sosial masyarakat Gowa-Tallo.

Namun, Kajian mengenai I Mallingkang Daeng Mannyonri masih sering ditempatkan sebatas tokoh Islamisasi, dan belum banyak yang membahas lebih dalam sebagai figur pemimpin yang sukses memadukan etika lokal masyarakat Gowa-Tallo dengan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan. Padahal, proses Islamisasi di Kerajaan Tallo tidak berlangsung melalui penghapusan budaya lokal, melainkan proses akomodasi dan adaptasi budaya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian yang menempatkan I Mallingkang Daeng Mannyonri bukan sebagai tokoh penyebaran Islam, tetapi sebagai figur pemimpin yang berhasil membangun integrasi antara etika politik lokal dan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan Kerajaan Tallo. Penelitian ini juga menggunakan *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka* sebagai sumber utama memahami transformasi kepemimpinan dan perubahan sosial masyarakat Tallo pada masa awal Islamisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menanalisis integritas nilai etika lokal, moralitas tradisional, dan ajaran Islam dalam kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri sebagai Raja ke-VI Kerajaan Tallo, masyarakat di Kerajaan Tallo, serta pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintahan, pola kepemimpinan, dan perubahan sosial masyarakat pada masa awal Islam di Kerajaan Tallo. Adapun sumber utama dalam melakukan penelitian.

Buku A. Kadri Manyambeng dan Abd. Rahim Mone. *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka* (Sejarah Tallo), merupakan hasil transliterasikan dan terjemahan sejarah Tallo.[2] Membahas tentang silsilah raja-raja di Kerajaan Tallo, kebijakan pemerintahan, perkembangan arsitektur, serta problematika kerajaan tercatat dalam naskah tersebut. Beserta literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang akan kami jadikan referensi pada penelitian, yaitu:

[2] A. .. Kadir Manyambeang &. Abd. Rahim Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)* (Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1979).

Pengaruh kepemimpinan dan kebijakan Sultan Alauddin terhadap kerajaan Makassar (1593 – 1639 M), penelitian Nur Hikmah, Mastanning, Syamhari, dan Rahmawati yang membahas tentang Sultan Alauddin sebagai pemimpin yang berhasil memadukan nilai-nilai tradisional Makassar dengan ajaran Islam untuk menciptakan kerajaan inklusif, religius, dan maju dalam perdagangan internasional.[3]

Ekspansi Kerajaan Gowa Tallo Ke Limea Ajatappareng Abad XVI, penelitian Sahrul Habrianto.S, M Saleh Madjid, dan M. Rasyid Ridha yang membahas tentang perkembangan politik, perdagangan, hubungan antarkerajaan, dan ekspansi Gowa-Tallo menunjukkan kondisi sosial-politik sebelum dan sesudah Islamisasi.[4]

Sejarah Masuknya Ajaran Islam dan Pendidikan Islam di Masa Kesultanan Gowa penelitian Abdul Mukti, Yusnaili Budianti, Faisal, Muhammad Nazri, Muhammad Amran yang membahas menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Tallo. Melalui jurnal tersebut, peneliti memperoleh gambaran bahwa Islamisasi terjadi melalui peran ulama dan pengIslaman penguasa, yang kemudian berdampak pada perubahan sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat.[5]

Menurut H. Witdarmon, kepemimpinan tradisional adalah bentuk pengelolaan kekuasaan yang bertumpu pada nilai-nilai historis dan budaya yang diwariskan antargenerasi melalui adat serta struktur sosial masyarakat.[6]

Menurut Koentjaraningrat, "bahwa suatu proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun akan diterima dan ditransformasikan kr dalam masyarakat sendiri."[7]

Teori kekuasaan menjelaskan bagaimana otoritas diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam masyarakat, termasuk dalam sistem politik tradisional seperti kerajaan.[8]

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah lokal terkait dinamika Kerajaan Tallo pada masa awal Islam. Kajian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses Islamisasi di Sulawesi Selatan melalui pendekatan historis berbasis naskah Lontara, khususnya *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka.* Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam kajian kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai etika, moral dan ajaran Islam dalam konteks kerajaan tradisional, sekaligus memperkaya kajian tentang hubungan antara budaya lokal dan ajaran Islam dalam sistem pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat.

---

[3] Nur Hikmah, Mastanning, and Syamhari;Rahmawati, 'Pengaruh Kepemimpinan Dan Kebijakan Sultan Alauddin Terhadap Kerajaan Makassar (1593 -1639 M)', *Rihlah*, 11.01 (2023), pp. 53–73.

[4] Sahrul Habrianto. S and M. Rasyid Ridha M. Saleh Madjid, 'Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo Ke Limae Ajatappareng Abad XVI', *Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan Ekspansi*, 6.3 (2019), pp. 16–28.

[5] Muhammad Amran Abdul Mukti, Yusnaili Budianti, Faisal, Muhammad Nazri, 'Sejarah Masuknya Ajaran Islam Dan Pendidikan Islam Di Masa Kesultanan Gowa', *Jurnal Ilmiah Hospitality 365*, 11.2 (2022).

[6] Supardi Umar Congge, *PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKANADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA*, 2014, pp. 95–105.

[7] Muhammad Hafidz Alfidhin Hasbar. Dzakiy Muhammad Alfadhil, Agung Anugrah, 'BUDAYA WESTERNISASI TERHADAP MASYARAKAT', *Jurnal Sosial-Politika*, 2.2 (2021), pp. 99–108, doi:10.54144/jsp.v2i2.37.

[8] Yuyun Sri Wahyuni. Aninda Qoirunnisa, 'Legitimasi Kekuasaan Dalam Perspektif Max Weber Pada Pemerintahan Kontemporer', *Journal Transformation of Mandalika*, 6.12 (2025), pp. 592–98.

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pembahasan bagi mahasiswa dan pelajar dalam memahami sejarah lokal serta nilai-nilai kepemimpinan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Disamping itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah maupun lembaga pendidikan dalam mengembangkan materi pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami sejarah sebagai dasar pembentukan identitas dan karakter bangsa.

Metode

Penelitian ini mengkaji tentang integrasi nilai etika, moral dan ajaran Islam dalam kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri sebagai raja ke-VI Kerajaan Tallo, serta pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah, pola kepemimpinan, dan perubahan sosial masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian sejarah. Data yang digunakan adalah data kualitatif, data diperoleh dari kajian manuskrip (*Lontarak Patturioloang ri TuTalloka*) sebagai sumber primer. Dan sumber sekunder adalah literatur yang telah diterbitkan.

Pendekatan dalam penelitian sejarah adalah cara kerja yang digunakan peneliti untuk mengkaji suatu persoalan, yaitu bagaimana suatu masalah didekati, dinilai, dan dipahami berdasarkan sudut pandang tertentu baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Berhubungan dengan penelitian yang membahas tentang kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri pada masa awal Islam di Kerajaan Tallo maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Agama, dan Pendekatan Politik Islam.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk meninjau dan mengkaji suatu permasalahan tidak hanya dari aspek peristiwa sejarah semata,tetapi juga dilihat dari dinamika sosial masyarakat yang melingkupinya. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mengalami dan merespon perubahan,sehingga dapat diketahui bagaimana nilai, norma, dan struktur sosial terbentuk serta berubah. Pendekatan sosiologis yaitu untuk membahas tentang bagaiaman kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri di Kerajaan Tallo memengaruhi perubahan sosial keagamaan masyarakat,khususnya dalam proses penerimaan Islam, penyesuaian nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam, serta dampaknya terhadap pola hubungan sosial, sistem nilai, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan agama dimaksudkan untuk meninjau dan mengkaji permasalahan bukan hanya dari aspek rasional dan historis, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan. Agama dijadikan sebagai dasar dalam memahami motivasi perubahan sosial, sekaligus sebagai landasan normatif dalam menilai kebijakan dan pola kepemimpinan. Pendekatan agama yaitu untuk membahas bagaimana peran I Mallingkang Daeng Mannyonri dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Tallo, khususnya dalam penerapan nilai etika, moral, dan prinsip keislaman yang memengaruhi kebijakan, kepemimpinan, serta perubahan sosial keagamaan masyarakat.

Pendekatan politik Islam dimaksudkan untuk meninjau dan mengkaji permasalahan bukan hanya dalam aspek kekuasaan dan kebijakan secara rasional, tetapi juga ditinjau berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan ini menjadikan ajaran Islam sebagai sebagai dasar dalam menilai dalam menilai legitimasi, etika dan arah kebijakan pemerintahan, sehingga kekuasaan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Pendekatan politik Islam yaitu untuk membahas bagaimana kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri dalam Kerajaan Tallo

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintahan serta bagaimana penerimaan Islam memengaruhi pola kepemimpinan dan mendorong perubahan sosial keagamaan dalam masyarakat.

Langkah- langkah penelitian yang digunakan adalah Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan sejarah).

Latar Kehidupan Dan Pembentukan Karakter Kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri

I Mallingkang Daeng Mannyonri merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam di kerajaan Gowa. Sebelum berkuasa ia bergelar Karaeng Kanjilo, kemudian setelah mengalahkan Sigeri beliau bergelar Karaeng Sigeri, lalu setelah berkuasa dan memerintah di Tallo beliau bergelar Karaenga di Tallo. Ia dikenal dengan gelar Sultan Abdullah Awwalun Islam setelah memeluk Islam dan kemudian setelah perang pengIslaman di Sulawesi Selatan berakhir, beliau diberi gelar Karaeng Matoaya. Beliau memangku pemerintahan dan menduduki tahta kerajaan pada umur 20 tahun. 15 tahun setelahnya agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan pada malam Jumat, 22 September 1605.

Beliau juga merupakan raja yang pertama-tama disumpah dengan Al-Qur'an yang diapit oleh salah satu *kalompoang* di Gowa yaitu Sudanga (semacam Kalewang). Dikatakan juga dalam Lontara sejak beliau memeluk agama Islam sampai mangkatnya, tidak pernah meninggalkan Shalat, kecuali kena bisul pada pahanya sehingga tidak dapat duduk.[9]

Karakter kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri dibentuk oleh nilai-nilai kebudayaan suku Makassar yang luhur semenjak masa mudanya dilingkungan aristokratis. Dua pilar moral utama dalam kebudayaan tersebut adalah *siri'* (menjaga kehormatan dan martabat) serta *lambusuk* (kejujuran, kelurusan, dan keteguhan dalam memegang janji). Ketika ia menerima islam dalam bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, nilai-nilai lokal tersebut menemukan jangkar teologisnya yang kuat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tercermin dalam Surah Al-Azhab (33) ayat 70:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ ۝٧٠

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.[10]

Perintah untuk bersikap jujur dan lurus (*qaulan sadida*) melandasi pilar *lambusuk* yang dipraktikkan Daeng Mannyonri selama memimpin kerajaan Tallo. Bentuk kesalehan pribadi dan kelurusan moral ini tercatat secara eksplisit dalam naskah lontarak, dimana semenjak memeluk islam hingga akhir hayatnya, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah sholat, terkecuali saat didera sakit parah pada pahanya. Keteguhan iman ini merefleksikan bahwa sumpah jabatan menggunakan Al-Qur'an yang ia ucapkan di awal pemerintahan bukan sekedar formalitas politik, melainkan sebuah komitmen takwa yang utuh. Integritas kata dan perbuatan inilah yang membuatnya dipercaya oleh para bangsawan dan *Bate Salapang* untuk mengongsolidasikan serta menstabilkan kembali roda pemerintahan kerajaan yang sempat bergejolak.

[9] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo).*
[10] https://quran.nu.or.id/al-ahzab/70, diakses pada 22/05/2026

Beliau adalah putera sulung dari raja Gowa Karaeng Tunijalo dari isteri pertamanya yang bergelar Karaeng Iwarak, gelar lainnya adalah Karaenga di Naungan. I Mallingkang Daeng Mannyonri memiliki anak laki-laki berjumlah 17 dan dan 3 orang perempuan.[11]

Dalam sejarah Kerajaan Gowa-Tallo, ia bukan hanya berperan sebagai Raja Tallo, tetapi juga sebagai mangkubumi yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, militer, perdagangan penyebaran Islam dan pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo.[12]

Berdasarkan *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka*, Karaeng Matoaya atau yang memiliki nama lengkap I Mallingkang Daeng Mannyonri berasal dari garis keturunan bangsawan utama kerajaan Tallo. Dijelaskan juga bahwa beliau merupakan putra dari Tumenanga ri Makkoayang, yaitu raja ke-V Kerajaan Tallo. Dari perkawinan ayahnya lahir beberapa anak bangsawan, diantaranya Karaeng Matoaya, Karaeng Manjalling, dan Karaeng Jipang Baine. Kedudukan keluarga ini menunjukkan bahwa Karaeng Matoaya memiliki legitimasi kuat sebagai penerus kekuasaan di Tallo karena berasal langsung dari lingkungan istana kerajaan.[13]

Sejak muda I Mallingkang Daeng Mannyonri telah memegang beberapa gelar kebangsawan. Pada masa awal kehidupannya ia dikenal dengan gelar Karaeng Segeri, kemudian setelah menduduki pemerintahan Tallo ia bergelar Karaeng ri Tallo. Setelah berhasil memimpin proses Islamisasi dan memperluas pengaruh kerajaan Gowa Tallo di Sulawesi Selatan, ia lebih dikenal dengan gelar Karaeng Matoaya. Setelah menerima Islam pada tahun 1605 M, beliau memperoleh gelar Islam Sultan Abdullah Awwalul Islam sebagai tanda kedudukannya sebagai salah satu penguasa pertama yang memeluk dan menyebarkan Islam di kerajaan Tallo.Lontara tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan keluarga Karaeng Matoaya memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Gowa.

Kedekatan hubungan genealogis dan politik ini menjadikan Karaeng Matoaya berperan penting sebagai *Tumabbicara Butta* atau mangkubumi sekaligus pendamping Sultan Alauddin dalam menjalankan pemerintahan dan menyebarkan Islam di wilayah Gowa Tallo. Oleh karena itu, kedudukan Karaeng Matoaya tidak hanya sebagai raja Tallo, tetapi juga sebagai tokoh sentral dalam pembentukan pemerintahan Islam dan perkembangan sosial politik masyarakat Sulawesi Selatan pada masa awal Islamisasi.

I Mallingkang Daeng Mannyonri Ia tumbuh dalam lingkungan aristokrasi yang menjunjung tinggi adat, keberanian, *siri'* (harga diri), loyalitas, dan kemampuan memimpin. Dalam masyarakat Makassar *siri'* dipahami sebagai harga diri, kehormatan dan martabat yang harus dijaga dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan. Nilai budaya ini menjadi landasan utama dalam membentuk karakter pemimpin, termasuk keberanian, loyalitas, ketegasan kejujuran dan kemampuan memimpin.[14]

Oleh karena itu, sebagai bangsawan dan pemimpin I Mallingkang Daeng Mannyonri dibentuk oleh nilai-nilai budaya tersebut sejak kecil. Tradisi aristokrasi Kerajaan Gowa-Tallo mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, menjaga kehormatan kerajaan, serta menunjukkan loyalitas terhadap masyarakat dan adat. Budaya *siri'* juga menekankan pentingnya kejujuran dan keteguhan dalam memegang amanah.

---

[11] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)*.

[12] Syamsuez Salihima, 'Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi', *Jurnal Rihlah*, II.1 (2015), pp. 33–44.

[13] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)*.

[14] Universitas Makassar Universitas Bustan, Jumadi, 'Reaktualisasi Siri ' Sebagai Pembelajaran Nilai Pada Kepemimpinan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4 (2024), pp. 1100–10.

Nilai *lambusuk* atau kejujuran dipandang sebagai dasar moral seorang pemimpin agar mampu menjaga kepercayaan rakyat dan menjalankan pemerintahan secara adil.

Dengan demikan, kehidupan daeng Mannyonri dalam lingkungan aristokrasi Kerajaan Gowa-Tallo tidak hanya membentuknya sebagai bangsawan kerajaan tetapi juga membentuk karakter kepemimpinannya melalui *siri'* , keberanian, loyalitas, ketegasan, dan kecakapan yang menjadi ciri utama budaya politik dan sosial suku Makassar. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar kuat dalam kepemimpinannya di masa awal perkembangan Islam di kerajaan Tallo.

Kondisi Sosial Politik Kerajaan Tallo Sebelum Islamisasi

Pada masa itu, kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat yang disebut *Pangadakkang* atau *Panngadereng*, yaitu seperangkat aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, pemerintahan, hukum, serta hubungan sosial antara kelompok.[15] Sistem ini menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan sebelum datangnya Islam. Selain itu, masyarakat juga masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang mempercayai adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu, serta penghormatan kepada roh leluhur. Dalam sistem kepercayaan tersebut, raja dipandang memiliki kedudukan istimewa karena dianggap memiliki hubungan dengan kekuatan spiritual yang memberi legitimasi terhadap kekuasaannya.

Sebelum masuknya Islam, Kerajaan Tallo telah berkembang sebagai salah satu kekuatan politik penting di kawasan Sulawesi Selatan. Berdasarkan *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka* (Sejarah Tallo) bahwa struktur pemerintahan Tallo sudah terbentuk secara jelas dengan sistem monarki yang dipimpin oleh raja (*Karaeng*) dan didukung oleh raja bangsawan serta perangkat adat.[16] Sistem ini menunjukkan bahwa sebelum Islamisasi, Tallo telah memiliki tata kelola pemerintahan yang terorganisir dan stabil.

Ketika I Mallingkang Daeng Mannyonri mulai terlibat dalam pemerintahan kondisi politik di Kerajaan Gowa-Tallo sedang mengalami perubahan yang dinamis. Pada masa itu, kerajaan Gowa dan Tallo berkembang menjadi dua kekuatan politik besar yang memiliki hubungan erat dalam bidang pemerintahan, militer dan perdagangan. Hubungan tersebut kemudian melahirkan suatu persekutuan politik yang dikenal sebagai Kerajaan Makassar atau kerajaan kembar Gowa-Tallo. Dalam praktik pemerintahan, Gowa berperan besar dalam ekspansi wilayah dan kekuatan militer, sedangkan Tallo memainkan peran penting dalam bidang administrasi, diplomasi, dan pengaturan pemerintahan kerajaan. Keadaan ini menjadikan Gowa-Tallo sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di kawasan timur Nusantara pada akhir abad XVI hingga awal abad XVII.[17]

Kerajaan Gowa-Tallo berkembang sebagai kekuatan politik dan maritim utama di Sulawesi Selatan melalui ekspansi wilayah dan penguasaan jalur perdagangan strategis.

---

[15] Rusli Malli, 'PERJUMPAAN TRADISI ISLAM DALAM SARAK SEBAGAI UNSUR PANGNGADAKKAN (IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KEARIFAN LOKAL)', *Jurnal Tarbawi*, 2.2 (2014), pp. 169–80.

[16] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)*.

[17] Syamzan Syukur Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)', *Rihlah Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 11.01 (2023), pp. 74–95.

Menjelang abad XVII, kondisi politik dan perdagangan di Kerajaan Gowa-Tallo juga mengalami berbagai tantangan. Konflik antarkerajaan yang berlangsung terus-menerus serta pergantian pemerintah pada masa raja sebelumnya menimbulkan ketidakstabilan dalam kerajaan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa banyak pedagang Melayu dan Jawa sempat meninggalkan wilayah Makassar akibat situasi politik yang tidak menentu. Selain itu, dinamika perdagangan regional termasuk pengaruh kekuatan Eropa di Nusantara, turut mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi Gowa-Tallo.

Penerimaan Islam pada masa Karaeng Matoaya juga memiliki hubungan erat dengan stabilitas politik dan perluasan pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo. Islam menjadi faktor yang memperkuat solidaritas politik kerajaan sekaligus memperluas jaringan hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara. Dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, Gowa-Tallo memperoleh legitimasi baru dalam hubungan politik dan perdagangan internasional.

> *"Iaminne karaeng ampasallangi Mangkasaraka si Mangkasarak, ampasallangi Bugisika si Bugisik, passangalinna Luwuka."*

Beliaupun yang mengislamkan seluruh daerah di Sulawesi Selatan kecuali Luwu. Selain itu, Islamisasi memperkuat posisi Karaeng Matoaya dan Sultan Alauddin dalam mengonsolidasikan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam ke kerajaan lain tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi politik, yaitu pengaruh Gowa-Tallo dalam kawasan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, proses Islamisasi pada masa Karaeng Matoaya dapat dipahami sebagai perpaduan antara dakwah, transformasi sosial, dan strategi politik kerajaan.

Dalam situasi tersebut, I Mallingkang Daeng Mannyonri mulai memainkan peran penting dalam pemerintahan kerajaan. Berdasarkan *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka*, sejak usia muda ia telah dipercaya memegang lambang kerajaan dan terlibat dalam berbagai urusan pemerintahan sebelum resmi naik tahta sebagai Raja Tallo. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah dipersiapkan sejak awal sebagai tokoh penting dalam struktur politik Gowa-Tallo.

> *"Anne karaenga nikana tupanritaitaubarani, tumangngassengi, tukapatiyangi, tuganna aiki, panrita jamangi mangngassengi maktannang karemeng limanna, naassengi jamang bainea, jamang buraknea, ... "* (hal.34)[18]

Sebagai bangsawan utama yang berasal dari lingkungan aristokrasi kerajaan, ia memiliki legitimasi politik yang kuat serta memperoleh pendidikan kepemimpinan berdasarkan nilai adat dan tradisi pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo.

Kemampuan politik, keberanian, kecerdasan, dan pengaruhnya yang besar menjadikan I Mallingkang Daeng Mannyonri dipercaya oleh para bangsawan dan *Bate Salapang* dalam menghadapi berbagai persoalan kerajaan. Ia kemudian tampil sebagai salah satu tokoh sentral yang berperan dalam memperkuat kembali stabilitas pemerintahan Gowa-Tallo pada masa transisi menuju abad XVII. Melalui keterlibatannya dalam pemerintahan, kerajaan Makassar secara perlahan mampu kembali memperkuat pengaruh politik, perdagangan, dan militernya. Peran tersebut kemudian semakin besar ketika ia menjadi Raja Tallo sekaligus *Tumabbicara Butta* (mangkubumi) yang mendampingi Sultan Alauddin dalam menjalankan pemerintahan dan proses Islamisasi di Sulawesi Selatan.

Dalam aspek politik, hubungan yang erat dengan kerajaan Gowa bahkan sampai pada tahap integrasi kekuasaan, dimana muncul konsep "Dua Kerajaan Satu Kekuasaan". Hal ini

[18] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo).*

menunjukkan bahwa sebelum Islam, sistem politik di Tallo sudah bersifat kompleks dan memiliki jaringan kekuasaan yang luas.

Secara sosial, masyarakat Tallo tersusun dalam stratifikasi yang jelas, terdiri dari golongan bangsawan (*Karaeng*), pejabat adat *(Gallarang*), dan masyarakat biasa. Struktur ini memengaruhi pola hubungan sosial dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Loyalitas kepada raja menjadi salah satu prinsip utama, sebagaimana terlihat dalam kisah kesetiaan para pengikut terhadap penguasa dalam Lontara.

Dalam bidang ekonomi, Tallo telah berkembang sebagai wilayah yang aktif dalam perdagangan dan pelayaran. Hal ini terlihat dari aktivitas raja-raja Tallo yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti malaka dan wilayah timur Nusantara. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa sebelum Islam, Tallo telah terlibat dalam jaringan perdagangan internasional dan memilih kemampuan maritim yang kuat. Selain itu, masyarakat juga telah mengenal pertanian, pembuatan senjata dan alat produksi.

Dari segi budaya dan kepercayaan, sebelum Islam masuk, masyarakat Tallo masih menganut sistem kepercayaan tradisional yang bercorak animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini sangat memengaruhi legitimasi kekuasaan raja, yang sering dianggap memiliki kekuatan spiritual atau hubungan dengan dunia gaib. Praktik adat dan ritual keagamaan menjadibagian penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Dari kondisi sosial politik sebelum Islam juga ditandai dengan adanya konflik dan ekspansi wilayah antara kerajaan. Lontara mencatat berbagai peperangan yang dilakukan oleh raja-raja Tallo dalam memperluas kekuasaan dan mempertahankan wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik saat itu cukup intens dan kompetitif.

Selain itu kemajuan teknologi pada masa itu juga patut diperhatikan. Lontara menyebutkan bahwa masyarakat Tallo telah mengenal teknik pembuatan perahu, senjata, serta alat produksi lainnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa sebelum Islamisasi, Tallo telah memiliki tingkat keterampilan yang cukup tinggi dalam bidang teknologi maritim dan militer.[19] Hal ini menjadi faktor penting yang mendukung ekspansi wilayah serta mempertahankan kekuasaan dari ancaman luar.

Secara keseluruhan, kondisi awal kerajaan Tallo menjelang Islamisasi menunjukkan suatu masyarakat yang berkembang secara kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem pemerintahan yang terstruktur, hubungan politik yang kuat dengan Gowa, perkembangan ekonomi dan perdagangan, serta budaya lokal yang mengakar menjadi landasan penting bagi transformasi yang terjadi setelah masuknya Islam. Ketika Islam akhirnya diterima oleh penguasa dan masyarakat Tallo, proses tersebut tidak sepenuhnya menggantikan sistem yang ada, melainkan mengintegrasi nilai-nilai baru ke dalam struktur lama. Hal inilah yang kemudian membentuk karakter khas perkembangan Islam di Tallo, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya.

Integrasi Etika Lokal dan Nilai Islam dalam kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri

Peristiwa paling penting dalam kehidupan Karaeng Matoaya terjadi ketika Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui para ulama dari Minangkabau yang diutus oleh kesultanan Aceh. Salah satu ulama yang paling berpengaruh adalah Datuk ri Bandang yang berdakwah di wilayah Kerajaan Gowa-Tallo

[19] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo).*

> "*Ruangpulo taungi umurukna namakgauk ri Tallo. Tallumpulo taungi allima umurukna namantamak isilanga. Rihijraj sicakko anga assampulo allima, ri salapang bangnginna bulang Jumadele awalak, ri bangnginna Jumaka, rihera sicokkoang angngannang bilangngang allima, ri Satemberek ruampulo, namantamak isilan karaenga rua assarikbattang. Areng Arakna nikana Solotan Abdullahi Awwalul isilang.*" (hal.29)[20]

Pada tanggal 22 September 1605, I Mallingkang Daeng Mannyonri memeluk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, ia memperoleh gelar Sultan Abdullah. Peristiwa ini menjadi titik awal perkembangan Islam secara resmi di kerajaan Makassar. Tidak lama kemudian, Raja Gowa ke-XIV, I Mangarangi Daeng Manrabbia, juga memeluk Islam sehingga agama Islam kemudian agama resmi kerajaan.

Masuknya Islam tidak hanya membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga memengaruhi sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai pemimpin, Karaeng Matoaya berusaha mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem adat yang telah ada sebelumnya. Karaeng Matoaya menerapkan pola integritas antara syariat Islam dan sistem adat lokal melalui penyesuaian lembaga pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini membuat proses Islamisasi berjalan lebih mudah karena masyarakat tetap mempertahankan identitas budayanya sambil menerima ajaran agama baru. Pada masa pemerintahannya juga, terbentuk lembaga keagamaan yang di sebut *Parewa Sarak*, yaitu lembaga yang bertugas mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat.[21]

Pembentukkan *Parewa Sarak* menunjukkan bahwa syariat Islam mulai dilembagakan secara resmi dalam pemerintahan untuk mengatur urusan pernikahan, warisan, ibadah, dan persoalan sosial masyarakat.[22] Kehadiran lembaga ini menandai perubahan dalam sistem legitimasi pemerintahan, dimana kebijakan kerajaan tidak lagi samata-mata didasarkan pada adat, tetapi juga mulai mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks tersebut, Karaeng Matoaya berhasil membangun sistem pemerintahan yang mampu mengintegrasikan adat lokal dengan hukum Islam tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo. Selain itu, kebijakan perdagangan yang terbuka terhadap pedagang asing serta penguatan militer kerajaan menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya berorientasi pada penyebaran agama, tetapi juga pada penguatan stabilitas politik dan ekonomi kerajaan. Dengan demikian, pemerintahan Karaeng Matoaya memperlihatkan bentuk transformasi politik yang menjadikan Islam sebagian bagian dari sistem kekuasaan kerajaan.

Masuknya Islam pada masa kepemimpinan Karaeng Matoaya tidak membuat sistem adat yang telah berkembang dalam masyarakat Makassar dihapus. Sebaliknya, Islam diintegrasikan ke dalam sistem adat yang sebelumnya menjadi dasar kehidupan sosial dan politik masyarakat. Proses integrasi tersebut menunjukkan bahwa Islamisasi di Kerajaan Tallo berlangsung melalui pendekatan akomodatif dan adaptif terhadap budaya lokal. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab mulai dipadukan dengan nilai adat seperti *siri'* dan *lambusuk* yang telah lama hidup dalam masyarakat Makassar. Dengan demikian, kepemimpinan Karaeng Matoaya memperlihatkan adanya transformasi sistem

---

[20] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)*.

[21] Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)'.

[22] Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)'.

pemerintahan dari yang semula berbasis adat tradisional menuju pemerintahan yang mulai dipengaruhi prinsip-prinsip Islam tanpa menghilangkan identitas budaya lokal masyarakat Tallo.

Keberhasilan transformasi sosial keagamaan di Kerajaan Tallo tidak terlepas dari strategi kebudayaan yang dipilih oleh Karaeng Matoaya. Proses pengenalan tauhid dan syariat baru di lakukan secara bertahap tanpa menghancurkan tatanan adat yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Pendekatan akomodatif ini membedakan model Islamisasi di Sulawesi Selatan dengan wilayah lain yang kerap di warnai ketegangan kultural tajam. Pola kepemimpinan kultural yang adaptif ini merefleksikan metodologi dakwah yang digariskan Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl (16) ayat 125:

> اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ١٢٥
>
> *Artinya: Serulah manusia ke jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang bauk serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*[23]

Konsep bi-I-hikmah (dengan kebijakan/kecerdasan) dalam ayat ini di aplikasikan secara jitu oleh Karaeng Matoaya. Beliau memposisikan ajaran islam bukan sebagai entitas asing yang konfrontatif terhadap adat lokal, melainkan sebagai penguat nilai moral (al-Maw'izah al-hasanah) di dalam sistem pangadakkang. Melalui pendekatan bijaksana ini, masyarakat Tallo secara sukarela mengasimilasikan nilai tauhid dengan penghormatan adat tanpa kehilangan identitas kebudayaan aslinya. Akibatnya, transisi sosiologi dari kepercayaan animisme dinamisme menuju peradaban Islam berjalan stabil, minim konflik, serta melahirkan tatanan sosial baru yang harmonis.

Karaeng Matoaya tidak menghapus sistem *Pangadakkang* yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat, tetapi menempatkan nilai-nilai Islam sebagai penguat moral dalam sistem tersebut. Strategi tersebut sekaligus memperlihatkan kecerdasan politik Karaeng Matoaya dalam menjaga stabilitas kerajaan di tengah dinamika politik dan perdagangan kawasan Sulawesi Selatan pada awal abad XVII.

Selain berperan dalam bidang agama dan politik, Karaeng Matoaya juga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memajukan perdagangan dan ekonomi kerajaan. Pada masa pemerintahan, pelabuhan Somba Opu berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan timur Nusantara. Letak Makassar yang strategis menjadikannya tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah seperti Jawa, Melayu, Ternate, bahkan bangsa Eropa. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Gowa=Tallo berkembang sebagai pusat perdagangan internasional dengan kebijakan terbuka terhadap berbagai jaringan dagang regional maupun asing.

Dalam bidang militer, Karaeng Matoaya juga melakukan berbagai pembaruan untuk memperkuat kekuasaan kerajaan Makassar. Ia memperluas pengaruh kerajaan melalui ekspedisi laut ke berbagai wilayah seperti Buton, Nusa Tenggara, dan daerah-daerah lain di Sulawesi. Selain itu, ia memperkuat pertahanan kerajaan dengan membangun benteng-benteng besar, membuat kapal perang yang lebih modern, serta memproduksi meriam dan mesiu. Kekuatan militer Makassar pada masa itu menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim

[23] https://quran.nu.or.id/an-nahl/125, diakses pada 22/05/2026

terbesar di Indonesia bagian timur. Kemampuan militernya juga digunakan untuk menertibkan wilayah-wilayah yang memberontak dan menjaga stabilitas politik kerajaan.

Kebijakan militer Karaeng Matoaya menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya berorientasi pada upaya menjaga stabilitas kerajaan dan melindungi masyarakat. Dalam konteks politik Islam, kekuatan militer dipandang sebagai alat mempertahankan ketertiban dan keamanan kerajaan.

Kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri menunjukkan adanya proses integrasi antara sistem nilai lokal masyarakat Makassar dengan ajaran Islam yang mulai berkembang pada awal abad XVII. Integrasi tersebut tidak berlangsung melalui penghapusan adat lama, melainkan melalui penyesuaian dan perpaduan antara nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Karaeng Matoaya tampil bukan hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai tokoh transformasi sosial dan kegamaan di Kerajaan Tallo.

Dalam tradisi masyarakat Makassar sebelum Islam, sistem nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial dan politik adalah Pangadakkang atau Panngadereng. Sistem tersebut menekankan pentingnya *siri'*, *lambusuk*, *pacce'*, keberanian, kesetiaan, dan kehormatan sebagai landasan moral seorang pemimpin.

Kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masyarakat Makassar memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip moral Islam. Dalam budaya masyarakat Makassar, *siri'* merupakan nilai utama yang berkaitan dengan harga diri, kehormatan dan martabat sosial. Nilai ini mendorong seorang pemimpin untuk menjaga kehormatan kerajaaan dan menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab. Sementara itu *lambusuk* dipahami sebagai kejujuran, kelurusan, dan keteguhan dalam memegang amanah.

Ketika Islam masuk ke Kerajaan Tallo, nilai *siri'* dan *lambusuk*, tidak dihapus tetapi dipadukan dengan prinsip Islam seperti amanah, adil, musyawarah, dan tanggung jawab.

"Ketika beliau mengalahkan orang-orang Bugis beliau tidak meminta harta pampasan perang dari daerah-daerah yang ditaklukkannya. Bukan itu saja, beliau pun tidak memungut upeti sebagai tanda takluk kepadanya, karena beliau tidak ingin rakyatnya menderita karena pembayaran upeti." (hal.16)[24]

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri tidak hanya berorientasi pada perluasan kekuasaan, tetapi juga memperhatikan kesajehteraan masyarakat. Sikap beliau yang tidak mengambil harta rampasan perang dan tidak membebani daerah taklukan dengan upeti memperlihatkan adanya kepedulian sosial terhadap rakyat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk menindas masyarakat yang telah ditaklukkan.

Salah satu bukti paling otentik mengenai keberhasilan integritas etika politik islam dengan moralitas tradisional Makassar tercermin dalam kebijakan pasca-perang yang diterapkan oleh Kareng Matoaya. Dokumen historis mencatat bahwa setelah menaklukkan daerah-daerah Bugis dalam perang maupun upeti tahunan dari wilayah taklukan tersebut. Kebijakan anti eksploitasi ini didasarkan pada rasa empati mendalam agar masyarakat didaerah taklukan tidak mengalami penderitaan ekonomi dalam dimensi lokal, tindakan ini merepresentasikan nilai pacce' sebuah rasa solidaritas sosial kemanusiaan yang menempatkan kedukaan orang lain sebagai tanggung jawab bersama.

[24] Mone, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)*.

Secara teologis, kebijakan humanis Karaeng Matoaya ini merupakan perwujudan dari perintah wajib dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٩٠

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.[25]

Ayat di atas membagi intruksi sosial menjadi dua aspek utama: penegakan keadilan *(al-'adl)* dan pemberian kebajikan murni *(al-ihsan).* Tindakan Karaeng Matoaya yang tidak menindas rakyat taklukan membuktikan baha kekuasaan militer dijalankan dengan koridor *al-'adl* (keadilan hukum), sementara penolakannya terhadap perampasan harta dan pemerasan upeti adalah bentuk konkret dari *al-ihsan* (kebijakan melampaui standar kewajiban standar).

Dalam konteks ini, tindakan Karaeng Matoaya yang tidak menindas rakyat menunjukkan upaya menjaga kehormatan kerajaan melalui pemerintahan yang adil dan beradab. Seorang penguasa yang bertindak sewenang-wenang dianggap dapat merusak *siri'* atau kehormatan dirinya maupun kerajaannya.

Penolakannya terhadap praktik perampasan dan pemerasan ekonomi menunjukkan bahwa beliau menjalankan kekuasaan secara lurus/*lambusuk* dan tidak memanfaatkan kemenangan perang untuk kepentingan pribadi. Nilai ini sejalan dengan prinsip amanah dalam ajaran Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat.

Disisi lain, kebijakan tersebut juga memperlihatkan adanya nilai *pacce'*, yakni rasa empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Beliau tidak menginginkan rakyatnya menderita menunjukkan bahwa keputusan politik yang diambil didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Dalam budaya Makassar, *pacce'* menjadi dasar hubungan sosial yang menempatkan kepentingan dan penderitaan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama.

Nilai keberanian dan kesetian juga tampak pada penolakan praktik penindasan yang lazim dilakukan penguasa pada masa itu. Sementara itu, kesetian tercermin dalam tanggung jawab beliau menjaga kesejahteraan rakyat dan mempertahankan stabilitas kerajaan

Kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri dapat dipahami melalui konsep kepemimpinan tradisional yang dikemukakan oleh H. Witdarmon, yaitu bentuk kekuasaan yang bertumpu pada legitimasi adat, nilai historis, dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks Kerajaan Tallo, legitimasi kepemimpinan Karaeng Matoaya tidak hanya berasal dari garis keturunan bangsawan, tetapijuga dari kemampuannya menjaga nilai *siri'* dan *lambusuk* sebagai dasar moral masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo. Setelah Islam diterima, terjadi transformasi budaya sebagaimana yang dijelaskan Koentjaraningrat, yaitu perubahan struktur nilai dan kehidupan sosial akibat pengaruh eksternal. Islam sebagai unsur baru tidak menghapus budaya lokal, tetapi berintegrasi dengan sistem adat yang telah berkembang sebelumnya. Selain itu, teori kekuasaan juga terlihat dalam perubahan legitimasi politik kerajaan setelah Islamisasi. Jika sebelumnya kekuasaan hanya didasarkan pada keturunan dan simbol adat, maka setelah Islam masuk kekuasaan mulai dipahami sebagai amanah moral dan religius yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan maslahatan

[25] https://quran.nu.or.id/an-nahl/90, diakses pada 22/05/2025

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Karaeng Matoaya merupakan bentuk perpaduan antara kekuasaan tradisioanal dan etika politik Islam.

Integrasi nilai tersebut menjadi faktor penting yang membuat Islam mudah diterima masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kepemimpinan Karaeng Matoaya menunjukkan pola Islamisasi yang bersifat adaptif dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Penerimaan Islam oleh Karaeng Matoaya menandai perubahan orientasi moral kepemimpinan yang kemudian diperkuat melalui simbol-simbol legitimasi keislaman dalam pemerintahan. Masuknya Islam pada masa Pemerintahan I Mallingkang Daeng Mannyonri tidak hanya mengubah aspek keagamaan masyarakat, tetapi juga membawa transformasi terhadap konsep kekuasaan dalam Kerajaan Tallo. Sebelum Islamisasi, legitimasi kekuasaan raja terutama didasarkan pada garis keturunan bangsawan, adat dan kepercayaan spiritual tradisional masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo. Raja dipandang sebagai figur yang memiliki kedudukan istimewa dalam struktur sosial-politik kerajaan serta dihormati karena istimewa dalam struktur sosial-politik kerajaan serta dihormati karena legitimasi adat dan kepercayaan tradisional yang melekat pada kekuasaannya. Pandangan tersebut merupakan bagian dari sistem *Pangadakkang* yang menjadi dasar pengaturan kehidupan sosial dan pemerintahan masyarakat Tallo sebelum Islamisasi.

Setelah Islam diterima pada tahun 1605, legitimasi kekuasaan tersebut mengalami perubahan penting. Dalam *Lontarak Patturioloang ri TuTalloka* dijelaskan bahwa Karaeng Matoaya menjadi raja pertama yang disumpahkan menggunakan Al-Qur'an.[26] Peristiwa ini menunjukkan transformasi konsep legitimasi kekuasaan, dari yang semula terutama didasarkan pada garis keturunan bangsawan dan otoritas adat, menuju bentuk legitimasi baru yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah moral dan religius yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

Perubahan konsep kekuasaan ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manuasia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.[27]

Berdasarkan ayat ini, jabatan Karaeng yang dipegang oleh Daeng Mannyonri diartikan sebagai tugass moral untuk menegakkan keadilan. Penerapan nyata dan prinsip keadilan ini terlihat ketika beliau memasukkan aturan-aturan islam ke dalam pemerintahan tanpa menghapus hukum adat yang sudah ada.

Hal ini menunjukkan bahwa Karaeng Matoaya berhasil membangun model kepemimpinan baru yang memadukan adat lokal dengan etika politik Islam. Proses integrasi nilai tersebut juga terlihat dalam pembentukan *Parewa Sarak* sebagai lembaga yang menangani

[26] Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)'.

[27] https://quran.nu.or.id/an-nisa/58, diakses pada 22/05/2026

urusan syariat Islam dalam masyarakat.[28] Kehadiran lembaga ini menunjukkan bahwa Islam mulai dilembagakan ke dalam struktur pemerintahan kerajaan tanpa menghapus sistem adat yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, syariat Islam berjalan berdampingan dengan *Pangadakkang* sebagai sistem sosial-politik masyarakat Makassar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Karaeng Matoaya menerapkan pola pemimpinan yang akomodatif dan adaptif terhadap budaya lokal sehingga Islam lebih mudah diterima masyarakat.

Islamisasi pada masa kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Tallo. Perubahan tersebut terlihat dalam berkembangnya praktik keagamaan Islam seperti perlaksanaan shalat, pendidikan agama, hukum perkawinan, dan tata kehidupan sosial yang mulai disesuaikan dengan syariat Islam. Masyarakat yang sebelumnya sangat dipengaruhi kepercayaan animisme dan dinamisme secara bertahap mulai mengenal konsep kehidupan yang berlandaskan nilai tauhid dan ajaran moral Islam.

Nilai *siri'*, *lambusuk*, loyalitas dan penghormatan terhadap adat tetap dipertahankan serta dipadukan dengan prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Kerajaan Tallo lebih bersifat transformasi budaya daripada penggantian budaya secara total. Selain memengaruhi kehidupan masyarakat, Islamisasi juga memperkuat hubungan politik antarkerajaan Islam di Nusantara serta memperluas identitas sosial masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo sebagai bagian dari jaringan dunia Islam di kawasan timur Nusantara.

Kehadiran *Parewa Sarak* sebagai lembaga keagamaan menunjukkan bahwa Islam mulai dilembagakan secara resmi dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya lembaga tersebut, urusan sosial-keagamaan tidak lagi hanya diatur berdasarkan adat, tetapi juga berdasarkan syariat Islam.[29] Karaeng Matoaya tidak menghapus struktur sosial dan adat yang telah ada sebelumnya, melainkan melakukan penyesuaian secara bertahap. Hal ini menyebabkan proses Islamisasi berlangsung relatif stabil dan diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik budaya yang besar. Dengan demikian Islamisasi di Tallo lebih bersifat transformasi budaya daripada penggantian budaya secara total.

Integrasi nilai lokal dan Islam juga terlihat dalam pola penyebaran Islam yang dilakukan Karaeng Matoaya bersama Sultan Alauddin. Penyebaran Islam dilakukan berdasarkan prinsip perjanjian antarkerajaan yang menyatakan bahwa siapa pun yang menemukan jalan yang lebih baik wajib memberitahukannya kepada kerajaan lain. Prinsip tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara etika politik lokal dengan konsep dakwah dalam Islam. Dalam konteks ini, Islamisasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial seorang pemimpin terhadap masyarakat dan kerajaan lain.

Jalinan integritas nilai moral dalam kepemimpinan Karaeng Matoaya tidak hanya berdampak pada kebijakan domestik Kerajaan Tallo, melainkan juga melandasi etika berdiplomasi dengan Kerajaan tetangga di Nusantara. Lontarak mencatat sebuah prinsip unik dalam pola penyebaran Islam yang dilakukan oleh Karaeng Matoaya bersama Sultan Alauddin: terdapat konsensus moral antar kerajaan bahwa jika salah satu pihak menemukan "jalan yang lebih baik" (kebenaran agama), maka mereka memegang kewajiban etis untuk menyampaikan

---

[28] Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)'.

[29] Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)'.

kepada kerajaan yang lain. paradigma diplomasi ini berakar kuar pada nilai Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ

Artinya: " *... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...*"[30]

Melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebajikan (*al-birr*) dan takwa (*at-taqwa*). Penyebaran Islam lintas kerajaan di Sulawesi Selatan diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial-moral tertinggal seorang pemimpin demi keselamatan bersama. Ekspansi politik dan dakwah tidak lagi didorong oleh nafsu invasi atau permusuhan (*al-'udwan*) demi penindasan material semata, melainkan sebagai jembatan kemaslahatan antarbangsa. Etika politik internasional yang berbasis pada Surah Al-Ma'idah ayat inilah yang akhirnya memperkuat solidaritas politik Gowa-Tallo serta memperluas jaringan diplomasi maritimnya di kawasan timur Nusantara pada abad XVII.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah *Lontarak patturioloang ri TuTalloka*, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama ;

Mengenai integritas nilai etika lokal, moralitas tradisional, dan ajaran Islam, kepemimpinan I Mallingkang Daeng Mannyonri (Karaeng Matoaya) berhasil menunjukkan proses akomodasi dan penyelesaraan yang mendalam antara kebudayaan Makassar dengan prinsip keislaman. Nilai-nilai moral tradisional pra-Islam seperti *siri'* (kehormatan), *lambusuk* (ketulusan), dan *pacce'* (empati sosial) tidak dihapus atau digantikan. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut menemukan landasan teologisnya di dalam Al-Qur'an dan diperkuat menjadi sebuah prinsip kesalehan. Sifat *lambusuk* bertransformasi menjadi komitmen moral dalam memegang amanah serta berkata benar (*qaulan sadida*). Di sisi lain, nilai *pacce'* bersinergi dengan konsep kebajikan murni (*al-ihsan*) dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

Terkait pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintahan dan pola kepemimpinan, masuknya Islam pada tahun 1605 mengubah orientasi kekuasaan di Kerajaan Tallo dari yang semula bertumpu pada hak keturunan bangsawan secara mutlak menjadi kekuasaan yang dipahami sebagai amanah moral dan religius. Pada kebijakan domestik, pengaruh ini terlihat jelas melalui pembentukan lembaga keagamaan *Parewa Sarak* yang berjalan berdampingan dengan lembaga adat *Pangadakkang* demi menegakkan keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Wujud keadilan dan keselurusan (*lambusuk*) kepemimpinan beliau juga tercermin dari kebijakan pasca-perang yang humanis, di mana beliau menolak merampas harta ataupun menarik upeti tahunan dari masyarakat daerah taklukkan Bugis agar mereka tidak menderita secara ekonomi. Sementara pada kebijakan diplomasi regional, tradisi atau perjanjian adat pra-Islam yang mewajibkan antar-kerajaan untuk saling memberi tahu jika menemukan "jalan yang lebih baik" diaplosi dan diisi dengan substansi nilai Tauhid serta Syariat Islam. Dengan landasan nilai tolong-menolong dalam kebajikan (ta'awun), penyebaran Islam lintas kerajaan tidak lagi digerakkan oleh ambil invasi militer yang opresif, melainkan diposisikan sebagai tanggung jawab moral seorang pemimpin demi kemaslahatan bersama.

[30] https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2, diakses pada 22/ 05/ 2026

Mengenai dampainya terhadap perubahan sosial masyarakat, proses Islamisasi di Kerajaan Tallo menghasilkan sebuah trasformasi budaya (*cultural transformation*), bukan penggantian budaya secara total (*cultural replacement).* Karena Karaeng Matoaya menerapkan strategis dakwah yang bijaksana (*bil-hikmah*) dan bertahap, masyarakat Tallo secara sukarela menerima dan menyesuaikan tata kehidupan meraka dengan syariat Islam seperti dalam hal ibadah shalat, hukum perkawinan, waris, dan tata sosial baru tanpa harus kehilangan identitas kebudayaan asli mereka. Pendekatan yang adaptif dan akomodatif ini tidak hanya menciptakan tatanan masyarakat baru yang harmonis dan stabil secara internal, tetapi juga berhasil memperluas jaringan diplomasi maritim serta memperkuat posisi sosial=politik Kerajaan Gowa=Tallo di dalam jaringan dunia Islam kawasan timur Nusantara.

Daftar Pustaka

Abdul Mukti, Yusnaili Budianti, Faisal, Muhammad Nazri, Muhammad Amran, 'Sejarah Masuknya Ajaran Islam Dan Pendidikan Islam Di Masa Kesultanan Gowa', *Jurnal Ilmiah Hospitality 365*, 11.2 (2022)

Ahmad Habib Akramullah, Hasaruddin, Syamzan Syukur, 'I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud (Kondisi Kerajaan Islam Makassar Menjelang Pemerintahannya)', *Rihlah Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 11.01 (2023), pp. 74–95

Aninda Qoirunnisa, Yuyun Sri Wahyuni., 'Legitimasi Kekuasaan Dalam Perspektif Max Weber Pada Pemerintahan Kontemporer', *Journal Transformation of Mandalika*, 6.12 (2025), pp. 592–98

Bustan, Jumadi, Universitas Makassar Universitas, 'Reaktualisasi Siri ' Sebagai Pembelajaran Nilai Pada Kepemimpinan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4 (2024), pp. 1100–10

Dzakiy Muhammad Alfadhil, Agung Anugrah, Muhammad Hafidz Alfidhin Hasbar., 'BUDAYA WESTERNISASI TERHADAP MASYARAKAT', *Jurnal Sosial-Politika*, 2.2 (2021), pp. 99–108, doi:10.54144/jsp.v2i2.37

Hikmah, Nur, Mastanning, and Syamhari;Rahmawati, 'Pengaruh Kepemimpinan Dan Kebijakan Sultan Alauddin Terhadap Kerajaan Makassar (1593 -1639 M)', *Rihlah*, 11.01 (2023), pp. 53–73

Malli, Rusli, 'PERJUMPAAN TRADISI ISLAM DALAM SARAK SEBAGAI UNSUR PANGNGADAKKAN (IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KEARIFAN LOKAL)', *Jurnal Tarbawi*, 2.2 (2014), pp. 169–80

Mone, A. .. Kadir Manyambeang &. Abd. Rahim, *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo)* (Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1979)

Nasihin, St Junaeda, and Fatjri Nur Tajuddin, 'Islamization in South Sulawesi and Its Institutionalisation As The State Religion (1605–1611)', *Journal of Social and Islamic Culture*, 32.2 (2024), pp. 45–66, doi:10.19105/karsa.v32i2.13834

S, Sahrul Habrianto., and M. Rasyid Ridha M. Saleh Madjid, 'Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo Ke Limae Ajatappareng Abad XVI', *Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan Ekspansi*, 6.3 (2019), pp. 16–28

Salihima, Syamsuez, 'Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi', *Jurnal Rihlah*, II.1 (2015), pp. 33–44

Umar Congge, Supardi, *PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKANADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA*, 2014, pp. 95–105

https://quran.nu.or.id/al-ahzab/70

https://quran.nu.or.id/an-nahl/125,
https://quran.nu.or.id/an-nahl/90
https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2